



FAKTOR YANG MENUNJANG KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

¹⁾Hendi Prihanto, ²⁾Usmar

¹⁾²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

¹⁾²⁾Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)

Email: ¹⁾hendiprihanto@dsn.moestopo.ac.id, ²⁾usmarismail1504@dsn.moestopo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis teori yang menunjang pengaruh kualitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ditinjau dari perspektif pendidikan latihan (diklat), pengalaman kerja pegawai, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas pengadaan barang atau jasa pemerintah. Populasi dan sampel dalam penelitian terdiri dari staf pusdiklat, auditor internal, pejabat pengadaan barang dan jasa, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dari kementerian yang diperoleh sampel sejumlah 119 dari keseluruhan sampel sebanyak 144 yang didistribusikan kepada responden dengan teknik pengambilan secara acak berdasarkan kesempatan yang diperoleh untuk mengisi kuesioner. Uji hipotesis t dan regresi berganda linear dilakukan setelah melalui pengujian kualitas data instrumen (validitas dan reliabilitas) melalui alat bantu SPSS terpenuhi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendidikan latihan (diklat) dan pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas PBJ, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas PBJ. Keterbatasan penelitian terdapat pada jumlah sampel yang hanya mewakili persepsi pada kementerian yang diambil sebagai sampel dan kurang mampu untuk mewakili dan menyimpulkan keadaan pada daerah dan wilayah sampel yang lain. Konsistensi dari skala persepsi yang diberikan responden terkadang memiliki jawaban yang tidak stabil.

Kata Kunci: Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat), Pengalaman Kerja, Sistem Pengendalian Internal (SPI), Kualitas Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah

I. PENDAHULUAN

Proses pengadaan barang atau jasa (PBJ) mendukung pelaksanaan *good governance* karena bertujuan untuk menciptakan efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi publik yang saat ini masih banyak terjadi praktik penyimpangan di Indonesia yang menduduki peringkat kedua. Banyaknya terjadi penyimpangan pada organisasi sektor publik salah satunya diakibatkan oleh perilaku pemimpin (Prihanto & Gunawan, 2020) yang tidak menjaga integritasnya dalam melakukan tugas dan kewajibannya (Umar, 2016). Permasalahan kecurangan merupakan hal yang sering terjadi pada lembaga publik karenanya dibutuhkan pengendalian yang baik (Siregar & Tenoyo, 2015) terlebih lagi jika didasarkan pada teknologi informasi pendukung yang modern (Halbouni, Obeid, & Garbou, 2016). Banyaknya kasus penyimpangan pada proses PBJ dapat disebabkan oleh banyak hal, namun dalam penelitian dilakukan penelusuran berdasar pada aspek personal penyelenggara kegiatan dan sistem yang diterapkan oleh organisasi pemerintah dalam melakukan pencegahan penyimpangan PBJ tersebut. Data penyimpangan dari pelaksanaan PBJ sepanjang tahun 2004 – 2007 dapat dilihat pada yang grafik 1 yang dikemukakan berikut:



Grafik 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasar Kegiatan Tahun 2004 – 2017

Sumber: (<https://tirto.id/korupsi-di-kementerian-dan-lembaga>) diakses 11-05-2020)

Adanya penyimpangan PBJ sering disebabkan konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976b) sebagai tendensi utama, sehingga memanfaatkan kegiatan PBJ ini untuk memperoleh keuntungan ekonomi sekelompok orang dan pribadi (Cressey, 1965; Crowe, 2011; Umar, 2016; Vousinas, 2019; Wolfe & Hermanson, 2004a; Yusuf, 2016). Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan pegawai negeri sipil merupakan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat bertujuan mengembangkan kemampuan para pegawai pemerintah (ASN), memperbaiki kepribadian, serta etika para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjang dengan pengalaman bekerja mereka dalam menangani pengadaan barang dan jasa secara profesional dan bertanggungjawab sebagai ukuran disebut berkualitas. Berdasarkan pada informasi yang dikemukakan gambar 1 disimpulkan bahwa PBJ merupakan bagian yang masih rawan terhadap tindakan kecurangan serta berpotensi besar terhadap tindak korupsi. Untuk itu diperlukan upaya dalam menciptakan sistem pengadaan yang dilakukan pemerintah menjadi dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas baik manakala tidak terjadi kecurangan dalam implementasinya.

Sistem pengendalian internal merupakan sistem dan prosedur yang diterapkan oleh institusi berupa struktur, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan terciptanya akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan (Peraturan Pemerintah RI No. 60, Tahun 2008). PBJ yang masih mengalami banyak kendala dan potensi kecurangan. Untuk itu penelitian diselenggarakan dengan maksud untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan latihan (diklat), pengalaman kerja aparat, serta peranan sistem pengendalian yang diterapkan terhadap kualitas penyelenggaraan PBJ yang dilakukan organisasi pemerintahan di Indonesia. Penelitian memberikan kontribusi dalam bentuk literatur teoritis dalam akademik dan praktis yang memberikan saran kepada pemerintah dan pihak terkait dalam pelaksanaan PBJ yang akuntabel dan profesional.

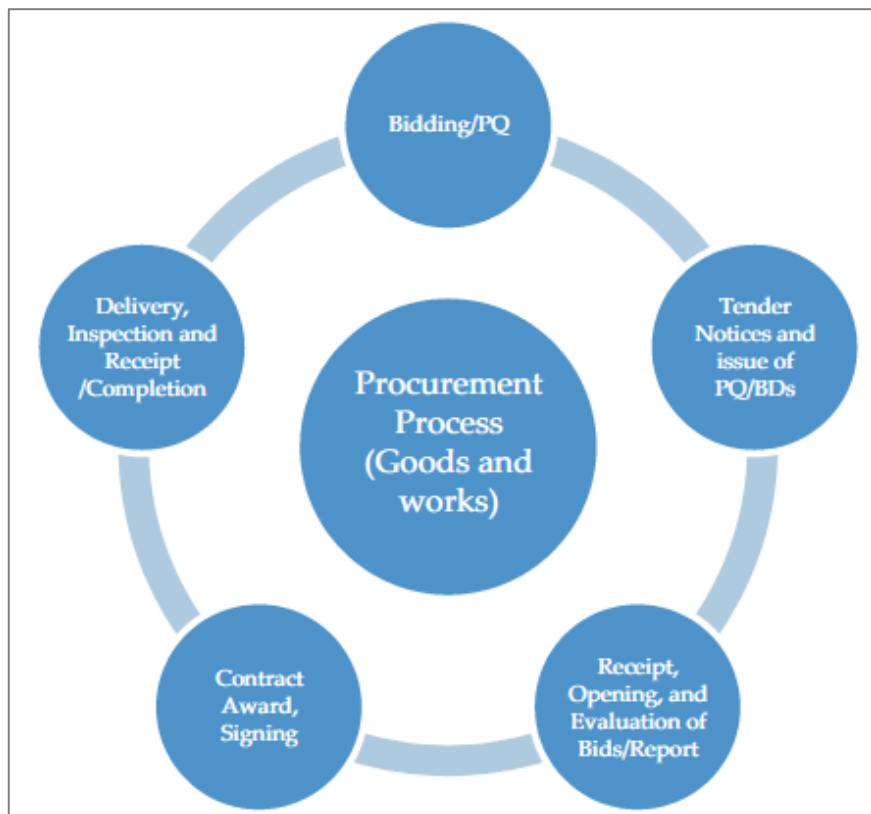
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Good Governance*

New Public Governance saat ini dipandang sebagai jawaban untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dihadapi pemerintahan dan menyediakan berbagai panduan praktik yang bermanfaat untuk memperluas kapasitas penyampaian layanan publik (Stanica & Aristigueta, 2019) dalam berbagai aspek. Negara – negara di kawasan Uni Eropa terus mengembangkan persyaratan baru dan memperkenalkan kriteria baru penerapan *good governance*, namun demikian tidak ada kesepakatan mengenai pengukuran kriteria tata kelola yang baik (Van Doeveren, 2011), untuk menciptakan *good governance* dengan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung-jawab, demokratis, efisien dan efektivitas, keterbukaan, transparansi, supremasi hukum (Van Doeveren, 2011) untuk menghindari salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi terlebih jika menggunakan sistem informasi yang berbasis IT (Halbouni et al., 2016) secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan rerangka hukum dan politik. Tata kelola yang dilakukan pada teknologi informasi tertentu dapat meningkatkan kapabilitas inovasi yang terkait dengan akuisisi pengetahuan, asimilasi, transformasi, dan eksploitasi. Selain itu tata kelola juga mendukung inovasi dikaitkan dengan ukuran, sumber daya, dan kompleksitas organisasi (Reyes, Juiz, Isis, & Duhamel, 2020). Dengan tata kelola yang baik diharapkan penyelenggaraan urusan negara yang diwakili oleh aparatur sipil negara (Ndraha, 2011) akan menghasilkan legitimasi dalam pertanggungjawaban urusan negara (Dowling & Pfeffer, 1975) yang baik pula dikenal dengan *legitimate*.

2.2 *Kualitas PBJ*

Kualitas sebagai fitur dan karakteristik dari suatu produk atau jasa yang membawa kemampuannya untuk menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan (Kotler & Keller, 2008). Kualitas PBJ yang baik merupakan kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan menjadi kebutuhan dan keinginan pengguna (Yamit, 2010) sehingga pengadaan barang atau jasa tersebut sesuai pesanan, sesuai kebutuhan dan diperoleh dengan harga yang sesuai (efisien). Dalam kegiatan PBJ meliputi perencanaan pengadaan yang dilakukan badan pengadaan harus menetapkan pengaturan pengadaan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program atau proyek yang ditetapkan (Khan, 2018), kebutuhan program atau proyek untuk barang, pekerjaan, dan jasa kemudian diidentifikasi dan dihitung berdasarkan pada biaya per unit (Khan, 2018). Lebih lanjut tahap akhir dalam pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan evaluasi Perbedaan utama antara pengadaan barang & pekerjaan dan pemilihan konsultan terletak pada : (i) masukan dan kualitas rekomendasi oleh jasa intelektual; dan (ii) harga barang dan pekerjaan yang diperlukan yang dapat diukur dalam *input* fisik merupakan faktor penentu dalam pemberian kontrak yang akan menghasilkan kualitas layanan rekomendasi intelektual, atau pengetahuan yang buruk dapat mengakibatkan kegagalan pada proses pengadaan barang dan jasa tersebut.



Gambar 1. Seleksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Sumber : (Khan, 2018)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh Pendidikan Pelatihan Terhadap Kualitas PBJ

Pencapaian daya dan hasil guna yang maksimal diperlukan adanya pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan pelatihan jabatan aparatur bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu atau kualitas, keahlian, kemampuan, dan keterampilan sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas aparat dalam melayani publik (Undang-undang nomor 43 tahun 1999). Penyelenggaraan diklat selayaknya memberikan efek yang positif terhadap pengetahuan yang dimiliki aparatur negara yang diharapkan akan menghasilkan kualitas kinerja para aparat yang baik pula, dan tentunya akan menambah pula kualitas dalam proses pekerjaan pengadaan barang dan jasa (Azizah Indriyani, 2020; Dono, Wirotomo & Popy, 2015; Jaka, Wiratama, & Sintaasih, 2013; Muhammad Syaifulloh, 2017; Mukhlisul, 2014), semakin tinggi pendidikan pelatihan yang diikuti oleh aparat, maka semakin memahami kualitas penyelenggaraan PBJ, sehingga hipotesis satu penelitian dikemukakan:

H1: Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan berpengaruh positif terhadap kualitas PBJ

2) Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengalaman kerja merupakan penguasaan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang diukur dari lamanya masa kerja, tingkat pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki pegawai yang hanya bisa didapatkan melalui tempat kerja (Pamungkas, et. al. 2017). Berpengalaman atau tidaknya seorang aparat dalam menangani pengadaan pada barang dan jasa dapat dilihat dari profesionalisme dan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikannya dengan penyelesaian pekerjaannya, dapat meliputi lama waktu atau masa kerja, tingkat pengetahuan,

dan keterampilan yang ternyata dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pekerjaan yang mereka laksanakan (Futri & Juliarsa, 2014; Mukhlisul, 2014; Wardhani, Iriyuwono, & Achsin, 2014; Wiratama & Budiarta, 2015), semakin berpengalaman seorang aparat dalam pekerjaannya, maka akan semakin berkualitas hasil kerjanya, untuk itu hipotesis kedua dikemukakan berikut:

H2: Pengalaman yang dimiliki aparat berpengaruh positif terhadap kualitas PBJ.

3) Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas PBJ

Pengendalian internal merupakan sistem yang memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan sesuai dengan perencanaan melalui kerangka kerja yang baik (Rubino & Vitolla, 2014), untuk itu adanya sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengadaan barang dan jasa (Astika, Wayan, & Lilik, 2018; Kiranayanti & Erawati, 2016; Tuti, 2014), sistem pengendalian internal yang baik juga memastikan bahwa efisiensi atas operasi yang tinggi dihasilkan (Feng, Mcvay, & Skaife, 2015) karena mampu untuk meminimalkan akibat risiko kejadian yang tidak menguntungkan bagi organisasi dan membawa organisasi pada keuntungan (Hajiha & Bazaz, 2016). Untuk itu adanya sistem pengendalian internal yang baik memberikan *output* yang positif pada pekerjaan yang dihasilkan, dengan demikian hipotesis penelitian tiga yang dikemukakan adalah:

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas PBJ

3.2 Desain Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner persepsi para aparat yang menangani kegiatan PBJ sebagai responden untuk memperoleh data penelitian. Populasi dan sampel penelitian merupakan staf Pusdiklat, Auditor internal, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kementerian Luar Negeri sebagai unit analisis dengan waktu penelitian berkisar antara bulan Mei – Agustus 2020. Sampel diambil secara keseluruhan terhadap 144 yang diambil secara acak kemudian diperoleh hasil akhir sejumlah 119 aparat (responden) yang menangani PBJ sebagai unit analisis. Kuesioner penelitian kemudian dilakukan pengolahan menggunakan metode regresi berganda dengan bantuan alat analisis SPSS. Data penelitian dalam bentuk kuesioner sebelumnya diolah menggunakan uji instrumen yaitu validitas dan reliabilitas dengan membandingkan r tabel *product moment* dan r hitung, kemudian dalam uji reliabilitas penelitian membandingkan antara nilai *cronbach alpha* yang diperoleh dengan nilai sesuai *role of thumb* sebesar ≥ 0.70 (Nunnally, 1978).

3.3 Pengukuran Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan skala persepsi *Likert* dengan nilai yang ditetapkan sebesar 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (kurang setuju), 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju). Pengukuran variabel penelitian sebagai dasar pembuatan instrumen penelitian didasarkan pada penelitian sebelumnya pernah dilakukan, dan mengadopsi beberapa teori yang menyatakan bahwa:

Kualitas PBJ (Aprizal & Jon Roi Tua, 2013) sebagai dependen variabel (Y) terdiri dari faktor penentu berikut : efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, terbuka dan bersaing, serta akuntabel.

Pendidikan dan latihan aparat PBJ sebagai independen (X1) terdiri dari faktor yang menentukan sebagai berikut: tahap persiapan, tahap pelaksanaan serta tahap evaluasi (Risky M, 2011)

Pengalaman aparat PBJ (Foster & Karen R. Seeker, 2001) sebagai independen (X2) terdiri dari faktor yang menentukan sebagai berikut: lamanya waktu, tingkat pengetahuan dan penguasaan terhadap pekerjaan

Sistem pengendalian internal COSO (McNally, 2013) sebagai independen (X3) terdiri dari faktor yang menentukan sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Validitas dan Reliabilitas Instrumen.

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas penelitian ditunjukkan pada tabel 1 dengan deskripsi bahwa keseluruhan instrumen penelitian yang digunakan dan di isi oleh para responden menunjukkan hasil yang layak sesuai *role of thumb* berikut:

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Variabel	Validitas	Reliabilitas	Keterangan	Item
Dik	$r_{hitung} > 0,176$	$0,938 > 0,70$	valid/reliabel	10
PK	$r_{hitung} > 0,176$	$0,894 > 0,70$	valid/reliabel	10
SPI	$r_{hitung} > 0,176$	$0,906 > 0,70$	valid/reliabel	10
PBJ	$r_{hitung} > 0,176$	$0,924 > 0,70$	valid/reliabel	9

Sumber: data yang diolah SPSS

Dapat disimpulkan dari hasil pengujian pada tabel 1 bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk membentuk bangunan variabel dalam penelitian ini memenuhi asumsi validitas yaitu semua nilai validitas lebih besar dari r tabel, dan reliabilitas yang ditetapkan dengan nilai yang lebih besar dari 0.70 (Nunnaly, 1978), untuk itu dengan kelayakan hasil yang diperoleh pengujian selanjutnya dapat dilakukan pengolahan uji hipotesis.

4.2.2 Statistik Deskriptif, dan Hipotesis Penelitian

Hasil dari uji statistik deskriptif untuk melihat demografi data sampel dan hasil pengujian hipotesis statistik dapat disajikan berdasarkan hasil *output* SPSS pada tabel 2 diperoleh interpretasi kondisi data sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif, Regresi Berganda dan Uji Hipotesis

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Dev	Variance	Koefisien Regresi	t	sig
Diklat (X1)	37	60	47,58	6,73	45,23	0,048	0,761	Ditolak
PK (X2)	29	60	43,12	6,23	38,83	0,055	0,971	Ditolak
SPI (X3)	35	60	43,78	5,58	31,16	0,711	9,050	Diterima ****
PBJ (Y)	30	54	38,59	5,40	31,16	-	-	-
Constanta	-	-	-	-	-	2,798	1,110	0,269
R	=	0,816	-	-	-	-	-	-
Adj (R ²)	=	0,657	-	-	-	-	-	-
F	=	76,322	-	-	-	-	-	0,000
Observasi	=	119	-	-	-	-	-	-

*=0.10, **=0.05, *** = 0.001, ****= 0.000

Sumber: data yang diolah oleh SPSS

Hasil penyebaran data kuesioner dengan total observasi sebanyak 119 menyatakan bahwa data yang diperoleh dikategorikan dalam data penelitian yang terdistribusi normal dengan ditunjukkan oleh nilai *mean* yang lebih besar dari standar deviasi pada tabel 2 deskriptif statistik, nilai yang diperoleh dari hasil tersebut terdistribusi secara merata dengan cakupan nilai yang mewakili dari nilai masing-masing variabel.

Hasil pengolahan data dengan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa keseluruhan model memiliki nilai yang positif, namun hipotesis yang dapat diterima adalah H3 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) dilingkungan organisasi pemerintahan, sedangkan hipotesis penelitian satu dan dua ditolak. Untuk itu hasil ditunjukkan dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y_{PBJ} = 2,798 \alpha + 0,048D_{iklat} + 0,055P_{K} + 0,711S_{PI} + e$$

Keterangan:

Y_{PBJ} : Kualitas PBJ

α : Konstanta

$\beta_{1D_{iklat}}$: Koefisien variabel diklat),

β_{2P_K} : Koefisien variabel pengalaman kerja pegawai

$\beta_{3S_{PI}}$: Koefisien SPI

e : Kesalahan prediksi/*error*

Kecocokan model yang menyatakan kombinasi variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen adalah sebesar 65.7 % yaitu kualitas PBJ dapat dipengaruhi oleh diklat, pengalaman dan sistem pengendalian internal. Sedangkan 35.3 % dapat dipengaruhi oleh variabel yang tidak diobservasi dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Hipotesis penelitian yang diuji didasarkan atas persepsi yang dikemukakan melalui kuesioner yang tidak seluruhnya dapat diterima, karena berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti hipotesis penelitian tiga yang hanya dapat diterima, sedangkan hipotesis satu dan dua ditolak dengan nilai signifikan yang tidak sesuai dengan *rule of thumb* yang menjadi acuan.

4.2.1 Pendidikan Pelatihan Terhadap Kualitas PBJ

Hasil pengujian menggunakan regresi berganda menyatakan bahwa pendidikan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan diikuti oleh para aparat pelaksana dalam PBJ tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas PBJ, sehingga hipotesis penelitian satu (H1) ditolak yang juga tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Futri & Juliarsa, 2014; Mukhlisul, 2014; Wardhani et al., 2014; Wiratama & Budiarta, 2015). Sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian dari aparat (pokja ULP) dan pejabat pembuat komitmen PBJ, maka pendidikan dan pelatihan sangat penting dilakukan untuk tercapainya akuntabilitas publik yang efisien, efektif, keterbukaan dan transparan (Van Doeveren, 2011) sebagai prinsip penyelenggaraan negara yang mencapai *good governance*. Namun demikian dengan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa hasil ini sesuai dengan fenomena penelitian yang menyatakan kegiatan PBJ memang masih belum dapat berjalan dengan efektif dengan terjadinya kasus sebanyak 169 sepanjang tahun 2004-2017 (sumber:

<https://tirto.id/korupsi-di-kementerian-dan-lembaga>, diakses 11-05-2020). Hal ini membuktikan bahwa salah satunya penyebabnya adalah sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya akibat konflik kepentingan pada pejabat yang menangani PBJ (Jensen & Meckling, 1976a). Terbuka potensi kecurangan dalam pelaksanaannya karena lemahnya integritas yang dimiliki oleh aparat pelaksana (Umar, 2016) karena kesempatan, kekuasaan dan tekanan (Cressey, 1965; Wolfe & Hermanson, 2004b; Yusof, 2016). Pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparat pemerintah dapat berpengaruh secara positif atau justru negatif apabila aparat negara tersebut menggunakan pendidikannya justru untuk melakukan kecurangan atau menyalahgunakannya (Tuanakotta, 2007). Untuk itu perlunya aparat negara untuk menjaga integritasnya (Umar, 2016) sehingga pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya bermanfaat dan berkontribusi dalam penyelenggaraan negara yang legitimate (Dowling & Pfeffer, 1975).

4.2.2 Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas PBJ

Pengalaman kerja selanjutnya merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam rangka meraih tujuan dan kinerja institusi, karena semakin pegawai berpengalaman dan berkompeten pada suatu pekerjaannya, maka seharusnya kualitas pekerjaan akan meningkat serta tingkat kegagalan atas pekerjaan tersebut seharusnya semakin menurun dan dapat diantisipasi. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas PBJ, dan hasil tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam pendukung penelitian ini (Futri & Juliarsa, 2014; Mukhlisul, 2014; Wardhani et al., 2014; Wiratama & Budiarta, 2015). Untuk itu berdasar hasil pengolahan data penelitian ini, hipotesis penelitian dua (H2) ditolak. Pengalaman sangat dibutuhkan dalam kegiatan PBJ yang meliputi perencanaan pengadaan yang dilakukan badan pengadaan dengan menetapkan pengaturan dan peraturan pengadaan yang akan dilakukan pencapaian tujuan program atau proyek yang ditetapkan (Khan, 2018). *Indonesia Procurement Watch* (IPW) menyatakan bahwa 70% kasus korupsi di Indonesia berbentuk penyimpangan pengadaan barang jasa dan menjadi faktor penyebab yang sangat rentan terhadap korupsi. Berdasarkan tabel 1.1 terdapat penyimpangan sebanyak 169 dalam kegiatan PBJ yang mengakibatkan kerugian negara, hal tersebut membuktikan bahwa pelaku penyimpangan PBJ seharusnya menggunakan pengalamannya dan integritas serta kompetensi dari pokja ULP/pejabat dalam pengadaan tersebut yang berimplikasi positif menekan dan menghindari penyimpangan (Arifianti, Santoso, & Handajani, 2015). Namun demikian hal terpenting yang harus dilakukan oleh aparat negara dalam menjalankan tugasnya ada menjaga integritas (Umar, 2016), sehingga dapat tercipta legitimate yang bertanggungjawab pada masyarakat dan lingkungan (Dowling & Pfeffer, 1975) khususnya dalam akuntabilitas PBJ sebagai sektor yang rawan terhadap korupsi.

4.2.3 Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas PBJ

Sistem pengendalian internal sebagai perangkat yang dimiliki oleh organisasi pemerintah memberikan bertujuan untuk memberikan kepastian dalam ketercapaian terhadap terselenggaranya urusan negara yang sehat dan akuntabel dan efektif dalam pencegahan kecurangan (Siregar & Tenoyo, 2015), untuk itu keberadaan sistem pengendalian internal pada organisasi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kegiatan PBJ sehingga hipotesis penelitian tiga yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBJ dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan referensi penelitian terdahulu yang digunakan dalam literatur riset ini (Astika, Wayan, & Lilik, 2018; Kiranayanti & Erawati, 2016; Tuti, 2014), dengan demikian sistem

pengendalian internal yang baik juga memastikan efisiensi yang tercipta atas operasional yang dihasilkan dengan baik (Feng et al., 2015), karena hal ini mampu untuk meminimalkan akibat risiko kejadian yang tidak menguntungkan bagi organisasi, dan membawa posisi organisasi pada keuntungan yang lebih baik (Hajiha & Bazaz, 2016). Adanya sistem pengendalian internal dalam rangka mencegah kecurangan efektif dilakukan oleh APIP (Aparat Pengendali Internal Pemerintahan) dengan berbagai cara yang dilakukan seperti strategi tindakan yang ditujukan pada lingkungan pengendalian, mitigasi terhadap risiko, kegiatan pengendalian dan informasi serta komunikasi sejalan yang kemukakan oleh Khan, (2018) dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terkontrol dalam pengendalian (gambar 2.1). Sistem pengendalian internal sebagai alat yang dimiliki pemerintah digunakan untuk mengendalikan tindakan yang telah direncanakan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan (Prihanto, Murwaningsari, Umar, & Mayangsari, 2020) yang menghasilkan akuntabilitas dan legitimasi pada penyelenggaraan urusan negara yang mengutamakan kepentingan publik (Dowling & Pfeffer, 1975).

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasar pada hasil pengolahan data statistik diperoleh bahwa adanya pendidikan latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki oleh aparat pelaksana PBJ tidak berpengaruh signifikan untuk menciptakan penyelenggaraan PBJ yang berkualitas pada organisasi pemerintah. Tidak berpengaruhnya pendidikan latihan (diklat) serta pengalaman yang dimiliki aparat dikarenakan integritas dari perilaku aparat masih belum menunjukkan nilai yang baik, sehingga mudah untuk pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya justru untuk melakukan kecurangan dalam kegiatan PBJ itu. Namun demikian peranan sistem pengendalian internal yang diterapkan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dalam penyelenggaraan PBJ yang berkualitas, hal ini dikarenakan sistem yang dirancang dan dilakukan oleh APIP tersebut mampu memberikan pengendalian dan memastikan perencanaan dapat berjalan dengan efektif pada pelaksanaannya.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada aspek unit analisis dan sampel yang kurang memadai dalam menyimpulkan hasil penelitian dengan permasalahan yang luas dialami oleh organisasi pemerintah. Selain itu adanya penelitian menggunakan kuesioner memiliki beberapa permasalahan seperti konsistensi jawaban melalui persepsi dan cara pandang responden dalam memandang permasalahan yang ada, selain subjektivitas yang berpotensi terjadi dalam penelitian ini akibat penggunaan persepsi dalam kuesioner.

5.3 Saran

Hasil penelitian merekomendasikan bahwa keterbatasan yang menjadi permasalahan yang diperoleh dari informasi penelitian ini adalah integritas aparat negara yang belum sepenuhnya maksimal sesuai dengan yang diharapkan, sehingga faktor yang berhubungan dengan personalitas atau pribadi aparat tidak mampu untuk mempengaruhi kualitas PBJ yaitu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh aparat pengelola PBJ tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk itu dengan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah merupakan strategi efektif yang mampu dalam meminimalkan dan menekan penyimpangan PBJ. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel

yang lebih luas lagi pada kementerian secara keseluruhan, agar hasil mampu menyimpulkan secara luas hasil penelitian selanjutnya mendatang. Alternatif pemilihan variabel lain dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya seperti manajemen risiko, kode etik, dan tata kelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprizal, & Jon Roi Tua, P. (2013). Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 17(1).
- Arifianti, R., Santoso, B., & Handajani, L. (2015). Perspektif Triangle Fraud Theory Dalam Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Provinsi NTB. *Jurnal Infestasi*, 11(2), 195–213.
- Astika, R., I Wayan, M., & Lilik, H. E. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17.
- Azizah Indriyani, M. S. dan S. B. R. (2020). Pengaruh Diklat Kependidikan Dan Kesejahteraan Guru Terhadap Kualitas Guru Di Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon. *Syntax Idea*, 2(7), 176–193.
- Cressey, D. R. (1965). The Respectable Criminal. *Criminologica*, 13–16.
- Crowe, H. (2011). Putting the Freud in Fraud: Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough. In *IN Howart, Crowe*.
- Dono, Wirotomo & Popy, P. (2015). Pengaruh Kompetensi, Pengembangan Karir, Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Knerja Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *MIX*, V(3), 466–480.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Association*, 18(1), 122–136.
- Feng, M., Mcvay, S. E., & Skaife, H. (2015). Does Ineffective Internal Control over Financial Reporting affect a Firm's Operations? Evidence from Firms' Inventory Management. *The Accounting Review*, 90(2), 529–557. <https://doi.org/10.2308/accr-50909>
- Foster, B., & Karen R. Seeker. (2001). *Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Jakarta.
- Futri, P. S., & Juliarsa, G. (2014). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.1, 1, 41–58.
- Hajiha, Z., & Bazaz, M. S. . (2016). Impact of internal control material weaknesses on executive compensation : evidence from Iran. *Int. J. Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 12(1), 70–84.
- Halbouni, S. S., Obeid, N., & Garbou, A. (2016). Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection. *Managerial Auditing Journal*, 31(6/7), .589-628. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2015-1163>
- Jaka, I. N., Wiratama, A., & Sintaasih, D. K. (2013). Pengaruh Kepemimpinan, Diklat, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pdam Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, Dan Kewirausahaan*, 7(2), 126–134.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976a). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost

- And Owneship Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305–360.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976b). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Khan, N. (2018). Chapter 3 How It Is Done : Procurement Cycle And Procedures. In *Public Procurement Fundamentals* (pp. 29–61).
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia , Sistem Pengendalian Intern , Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 1290–1318.
- Kotler, P., & Keller. (2008). *Manajemen Pemasaran* (13th ed.). Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- McNally, J. S. (2013). *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One approach to an effective transition.* " Strategic Finance 2013.
- Muhammad Syaifulloh, B. A. P. (2017). No Title. Analisis Profesionalisme Guru, Diklat Dan Prestasi Guru Terhadap Kualitas Pendidikan Pada Sekbin 3 Uptd Pendidikan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, 3(1).
- Mukhlisul, M. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Mukhlisul Muzahid). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 179–196.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Tangerang: Rineka Cipta.
- Peraturan, P. R. I. Nomor 60 Tahun 2008. Tentang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).
- Prihanto, H., & Gunawan, I. D. (2020). Corruption in Indonesia (Is It Right to Governance , Leadership and It to Be Caused ?). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 11(2), 56–65.
- Prihanto, H., Murwaningsari, E., Umar, H., & Mayangsari, S. (2020). How Indonesia Attempts to Prevent Corruption ! *Oceanide*, 12(2), 70–85.
- Reyes, L. L., Juiz, C., Isis, G., & Duhamel, F. B. (2020). Exploring the relationships between dynamic capabilities and IT governance Implications for local governments. *Transforming Government: People*, 14(2), 149–169. <https://doi.org/10.1108/TG-09-2019-0092>
- Risky M, H. (2011). Pengaruh Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dan Minat Kerja Terhadap Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja Siswa Kelas XII Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Batang Tahun 2010/2011.
- Rubino, M., & Vitolla, F. (2014). Corporate governance and the information system : how a framework for IT governance supports ERM. *Corporate Governance*, 14(3), 320–338. <https://doi.org/10.1108/CG-06-2013-0067>
- Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Fraud awareness survey of private sector in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 22(3), 329–346. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2014-0016>
- Stanica, C. M., & Aristigueta, M. (2019). Progress toward New Public Governance in Romania. *International Journal of Public Leadership*, 15(3), 189–206. <https://doi.org/10.1108/IJPL-01-2019-0004>
- Tuanakotta, T. M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Tuti, H. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR – Study & Accounting Research*, XI(1).
- Umar, H. (2016). *Corruption The Devil*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Van Doeveren, V. (2011). Rethinking good governance. *Public Integrity*, 13(4), 301–318.
- Vousinas, G. L. (2019). Elaborating on the theory of fraud . New theoretical extensions. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 1–17.
- Wardhani, V. K., Iriuwono, I., & Achsin, M. (2014). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Obyektivitas Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit. *Journal of Innovation in Business and Economics (JIBE)*, 5(1), 63–74.
- Wiratama, W. J., & Budiarta, K. (2015). Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit, 1, 91–106.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004a). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 72(12), 38–42.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004b). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 12, 38–42.
- Yamit, Z. (2010). *Manajemen Kualitas Produk & Jasa (Pertama)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Yusof, K. M. (2016). *Fraudulent Financial Reporting : An Application of Fraud Models to Malaysian Public Listed Companies Being a Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Hull by Khairusany Mohamed Yusof B . Acc (Honours)*, Universiti Sain.